

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL

Desti Nuris Rahma
destanurisir@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

In the local expenditure can't be loose from acceptance source, either balance of fund, regional loan, or regional income. Balance of fund is a funding source from APBN consisting of divide income fund, and special allocation fund, while regional income is a funding sourced from regional. The research aimed to analyze and examine the effect of Local Own-source Revenue, General Allocation Funds, Spesific Allocation Funds, and shared revenue on capital expenditure. The sample of This study amounted to 190 data consisting of 29 regencies and 9 cities obtained from the financial and Asset Management Agency of East Java (BPKAD) for the period 2013-2017. Research was quantitative. Moreover, the instrument used documentation. Furthermore, the data analysis technique used multiple linier regression. The research result concluded Local Own-source Revenue did not affect capital expenditure. On the oter hand, General Allocation Funds, Spesiffic Allocation Funds, and shared revenue had positive effect on capital expenditure of district or city in East Java.

Keywords: Capital Expenditure, Local Own-source Revenue, General Allocation Funds, Spesific Alloaction Funds, Shared Revenue

ABSTRAK

Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendanaan yang bersumber dari daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian ini berjumlah sebanyak 190 data terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur periode tahun 2013-2017. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi yang mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan dan kepentingan masing-masing masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah yang diterapkan di Provinsi, Kabupaten/Kota, diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk lebih menggali potensi-potensi sumber keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut sekaligus dapat mengalokasikan pada belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing.

Pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk anggaran belanja modal atau yang disebut APBN, merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik selama satu

tahun anggaran. Otonomi daerah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangannya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Dengan adanya otonomi daerah merupakan adanya kesempatan bagi Pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan daerah yang dimiliki serta sumber daya yang menjadi pendukung. Ketika daerah dapat mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri, otomatis akan terjadi pembangunan secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal (BM) adalah belanja pemerintah daerah yang bersifat rutin dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan seperti biaya belanja administrasi umum. Dalam mewujudkan prinsip desentralisasi, Pemerintah Pusat memberikan hak penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan memajukan daerahnya sendiri. Dalam mewujudkan prinsip desentralisasi, Pemerintah Pusat memberikan hak penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan memajukan daerahnya sendiri. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan beberapa sumber pendapatan yang sangat mendukung pemasukan suatu daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan agar dapat meningkatkan keuangan daerah yang akan digunakan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat atau tugas pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) menyatakan bahwa secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dampak negatif krisis ekonomi terjadi juga pada sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni menjadi labilnya sektor pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari APBN untuk APBD menjadi labil. Dengan kata lain faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Akibatnya tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja daerah menjadi lebih memprihatinkan pada daerah yang tingkat Pendapatan Asli Daerahnya rendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah juga bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU merupakan dana yang berasal dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang bersasal dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada Daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBN dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersasal dari pembiayaan APBN yang dialokasikan pada tiap-tiap daerah dengan memperlihatkan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerahnya sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam memperkirakan tercapainya peningkatan otonomi didaerah, dapat diamati dengan cara melakukan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan APBD yang diperoleh setiap tahunnya. Apabila Pendapatan Asli Daerah dari suatu daerah mampu memberikan kontribusi besar dalam pendapatan belanja daerah, maka

dapat dinyatakan bahwa daerah tersebut termasuk sebagai salah satu daerah yang cukup berkembang dan baik dari sektor perekonomian. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki pendanaan yang jauh memadai sehingga mengakibatkan daerah-daerah yang tertinggal akan mengalami kesulitan dalam pendanaan ketimpangan fiskal.

Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan terutama di sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan dan investor untuk membuka usaha di daerah Jawa Timur. Harapan ini akan bisa terwujud apabila ada upaya dari pemerintah dalam memberikan fasilitas yang mendukung. Apabila investor mau menanamkan modalnya, maka Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur akan meningkat secara drastis.

TINJAUAN TEORETIS

Stewardship Theory

Sejak awal perkembangan Teori *stewardship* diterapkan, akuntansi organisasi sektor publik telah disiapkan untuk melengkapi kebutuhan informasi keuangan. Informasi keuangan dapat ditinjau dari kemampuan keuangan pemerintah melalui pendanaan pemerintah daerah. Pendanaan yang dapat dilakukan pemerintah sendiri dilihat dari keadaan tingkat otonomi keuangan daerah. Tingkat otonomi keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan pengelolaan daerah.

Kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan keuangan daerah melalui eksplorasi kekayaan asli daerah yang dapat dibidang sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus lebih ditingkatkan pertumbuhannya oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian PAD adalah penghasilan yang bersumber dari dalam daerah yang berhubungan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut (Bratakusumah *et al*, 2002). Kategori PAD terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lain-lain yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah juga bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU merupakan dana yang berasal dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan DAU untuk Kabupaten/Kota ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal dalam suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang bersasal dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada Daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBN dan sesuai dengan Prioritas

Nasional. Sesuai dengan fungsinya DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan Prioritas Nasional yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah mendahulukan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan penyempurnaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang yang merupakan kegiatan khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dana Bagi Hasil

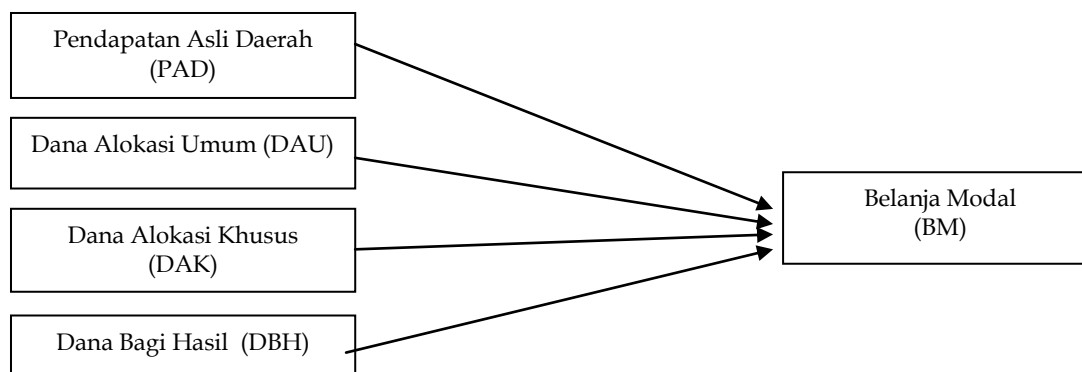
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersasal dari pembiayaan APBN yang dialokasikan pada tiap-tiap daerah dengan memperlihatkan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerahnya sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2009 : 67) Belanja Modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah belanja pemerintah yang pemanfaatannya lebih dari satu tahun yang akan menambah belanja yang bersifat rutin lebih dari satu tahun pada kelompok belanja administrasi dan umum.

MODEL PENELITIAN

Model penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Model Penelitian

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan pembiayaan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang berupa hasil dari retribusi daerah, hasil dari pajak daerah, hasil dari kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan hasil lainnya PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Mardiasmo (2009) peningkatan investasi modal bertujuan akan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat kerja sama publik yang tergambar dari adanya meningkatnya PAD terhadap pembangunan. Penelitian Darwanto dan Yustikasari

(2007) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Penelitian yang sejalan dengan yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa PAD terutama pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran salah satunya adalah belanja modal antar daerah secara merata. Pemerintah Pusat berharap agar setiap daerah juga dapat memaksimalkan dalam mengelola keuangannya dan mampu memanfaatkan PAD sehingga agar tidak tergantung terus menerus ke Pemerintah Pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) tentang Hubungan Antara Dana Alokasi Umum menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah tidak akan menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya juga yaitu keterikatan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum akan menjadi lebih besar.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus daerah. Menurut Verawaty dan Sari (2015) menyatakan bahwa dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menandakan bahwa penambahan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan untuk daerah dan sesuai dengan prioritas nasional telah dimanfaatkan secara tepat sasaran. Penelitian Wandira (2013) menyatakan bahwa antara dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh signifikan. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil bersasal dari APBN yang dibagikan kepada daerah yang didasarkan pada angka presentase tertentu dengan memcermati potensi daerah sebagai pencetus. Dana bagi hasil adalah salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah Kabupaten/Kota.

Wandira (2013) menyatakan bahwa secara sebagian terdapat pengaruh yang signifikan variabel dana bagi hasil terhadap belanja modal. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sama halnya dengan bagian dana perimbangan yang lainnya, dana alokasi khusus diharapkan dapat berpengaruh secara tidak langsung melalui alokasi belanja modal terhadap APBD.

H4: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena penelitian yang dilakukan adalah berupa data dalam bentuk angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik dan hasilnya akan dipaparkan secara sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan

data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh dari instansi Pemerintahan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2009) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah data karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penelitian yang menggunakan kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Jawa Timur dan Kabupaten/Kota yang telah memasukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara lengkap selama 5 Tahun dimulai tahun 2013-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi APBD periode tahun 2013-2017 yang diperoleh dari instansi Pemerintahan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan didasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi daerah, hasil pajak daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Widodoasri (2016) berikut perhitungan Dana Alokasi Umum didasarkan atas proporsi/persentase sebagai berikut:
$$PAD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan}}$$

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah satu dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dan bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Widodoasri (2016) berikut perhitungan Dana Alokasi Umum didasarkan atas proporsi/persentase sebagai berikut:
$$DAU = \frac{\text{Dana Alokasi Umum} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan}}$$

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dana alokasi khusus berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan prioritas sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Widodoasri (2016) berikut perhitungan Dana Alokasi Khusus didasarkan atas proporsi/persentase sebagai berikut:
$$DAK = \frac{\text{Dana Alokasi Khusus} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan}}$$

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Menurut Widoasri (2016) berikut perhitungan Dana Bagi Hasil didasarkan atas proporsi/persentase sebagai berikut: $DBH = \frac{\text{Dana Bagi Hasil} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan}}$

Variabel Dependen

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pembiayaan anggaran yang digunakan dalam rencana menambah aset tetap dan aset yang lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Widoasri (2016) berikut perhitungan Belanja Modal didasarkan atas proporsi/persentase sebagai berikut: $BM = \frac{\text{Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Total Belanja}}$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengolah data dan kemudian menganalisisnya dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$BM_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 DU_{t-1} + \beta_3 DK_{t-1} + \beta_4 DH_{t-1} + e$$

Keterangan :

α	: konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: nilai konstanta
PD	: pendapatan asli daerah
DU	: dana alokasi umum
DK	: dana alokasi khusus
DH	: dana bagi hasil
BM	: belanja modal
e	: error term

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel pada penelitian ini mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi dengan melihat penyebaran dua (titik) pada sumbu diagonal grafik. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode grafik atau uji Normal P-P *Plot Of Regression Standardized Residual* dengan dasar pengambilan keputusan

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Tujuan autokorelasi adalah untuk menguji apakah didalam model regresi linier berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dengan periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2006) Uji Multikolinearitas adalah uji yang memanfaatkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terjadi Multikolinearitas atau setidaknya yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) *Variance Factor* (VIF). Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai TOL lebih besar dari 0,10 dari nilai VIF menunjukkan kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model yang dapat dikatakan terbebas dari gejala adanya Multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan yang ada pada model regresi linier. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linier, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya Heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F pada dasarnya mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan F tabel dan T hitung dengan derajat kepercayaan yaitu 5%. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak signifikan. Dengan ini dapat ditandai dengan nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari *alpha*.

Koefisien Determinan (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya akan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R² dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen akan memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Uji t (Uji Hipotesis)

Uji t pada dasarnya menjelaskan pengaruh variabel independen secara parsial yang terhadap variabel dependen. Proses untuk untuk memahaminya yaitu dengan menyamakan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t maka t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif yang diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat bentuk dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan di dalam penelitian. Menurut Ghozali (2006) menyampaikan analisis statistik deskriptif akan memberikan paparan suatu data berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai minimum digunakan untuk mengetahui nilai yang paling rendah, nilai maksimum digunakan untuk mengetahui nilai yang paling tinggi dan terbesar, rata-rata digunakan untuk mengetahui rata-rata dari data yang ada didalam penelitian dan standar deviasi digunakan untuk mengetahui berapa besar data yang dan bervariasi dari rata-rata. Nilai variabel yang digunakan seperti variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal.

Dari hasil tabel 1 dibawah menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dalam penelitian ini adalah sebesar 177. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai terkecil adalah sebesar Rp20.306,23 yang dimiliki Kabupaten Situbondo 2016 dan nilai terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp121.264,92 yang dihasilkan oleh Kota Blitar pada tahun 2015. Rata-rata PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2013-2017 sebesar Rp325.409,22 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp912.483,06.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	177	20306,23	12126492,00	325409,2163	912483,06263
DAU	177	353127,85	1709892,85	888967,7685	293578,22261
DAK	177	18556,55	506688,73	151580,2744	125573,55574
DBH	177	39502,27	994881,18	99154,0814	112166,80505
BM	177	67646,32	740344,34	331698,6438	147345,41391
Valid (listwise)	177				

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Pada variabel Dana Alokasi Umum nilai terkecil sebesar Rp353.127,85 dimiliki oleh Kota Pasuruan tahun 2013 dan nilai terbesar Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp1.709.892,85 yang dimiliki oleh Kota Jember tahun 2016 sedangkan rata-rata DAU Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2013-2017 sebesar Rp888.967,77 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp293.578,22.

Pada variabel Dana Alokasi Khusus nilai terkecil sebesar Rp18.556,55 dimiliki oleh Kota Mojokerto tahun 2014 dan nilai terbesar Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp506.688,73 yang dimiliki oleh Kota Malang tahun 2017 sedangkan rata-rata DAK Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2013-2017 sebesar Rp151.580,27 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp 125.573,55.

Pada variabel Dana Bagi Hasil nilai terkecil sebesar Rp39.502,27 dimiliki oleh Kota Mojokerto tahun 2014 dan nilai terbesar Dana Bagi Hasil adalah sebesar Rp994.1154,08 yang dimiliki oleh Kota Bojonegoro tahun 2015 sedangkan rata-rata DBH Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2013-2017 sebesar Rp994.881,18 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp112.166,80.

Pada variabel Belanja Modal nilai terkecil sebesar Rp67.646,32 dimiliki oleh Kota Mojokerto tahun 2013 dan nilai terbesar Belanja Modal adalah sebesar Rp740.344,34 yang dimiliki oleh Kota Malang tahun 2017 sedangkan rata-rata BM Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2013-2017 sebesar Rp331.698,64 dan menghasilkan standar deviasi sebesar Rp147.345,41.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen yaitu belanja modal dengan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 2 tersebut dibawah menunjukkan bahwa konstanta regresi (α) memiliki nilai 12.825,93, Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai 0,006, Dana Alokasi Umum memiliki nilai 0,246, Dana Alokasi Khusus memiliki nilai 0.436, Dana Bagi Hasil memiliki nilai 0,323. Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BM = 12.825,93 + 0,006 PD + 0,246 DAU + 0,436 DAK + 0,323 DBH + \epsilon$$

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12825,930	20998,129		,611	,542
	PAD	,006	,007	,034	,790	,430
	DAU	,246	,027	,491	9,145	,000
	DAK	,436	,062	,372	7,024	,000
	DBH	,323	,059	,246	5,524	,000

a. Dependen Variable: BM

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik.

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel pada penelitian ini mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi dengan melihat penyebaran dua (titik) pada sumbu diagonal grafik.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	177
	Std. Deviation	,0000000
Most Extreme Differences	Absolute	83850,91681100
	Positive	,046
	Negative	,046
Test Statistic		-,035
Asymp. Sig. (2-tailed)		,046
		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan tabel uji *One-Sample Komogorov Test* diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan jika data terdistribusi secara normal. Dengan demikian hasil pengujian grafik dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* konsisten menunjukkan hasil data yang terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,361 terletak antara -2 sampai dengan +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. Regresi tersebut bisa dikatakan sebagai regresi yang baik karena regresi bebas dan tidak terjadi autokorelasi di dalamnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Sepanjang waktu autokorelasi muncul berkaitan satu sama lain. Dan jika terdapat masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya menjadi signifikan, dan tidak layak untuk dipakai. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokoreasi.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,822 ^a	,676	,669	84820,32378	1,361

Predictors : (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU

Dependent Variable : BM

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,361 terletak antara -2 sampai dengan +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. Regresi tersebut bisa dikatakan sebagai regresi yang baik karena regresi bebas dan tidak terjadi autokorelasi di dalamnya.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Mengidentifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala Multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Nilai Tolerance (TOL)*. Jika nilai *Tolerance* diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dibawah 10 maka tidak terjadi Multikolinieritas.

Tabel 5
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	12825,930	20998,129		,611	,542		
1 PAD	,006	,007	,034	,790	,430	,998	1,002
DAU	,246	,027	,491	9,145	,000	,654	1,528
DAK	,436	,062	,372	7,024	,000	,672	1,488
DBH	,323	,059	,246	5,524	,000	,948	1,054

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12825,930	20998,129		,611	,542
PAD	,006	,007	,034	,790	,430
DAU	,246	,027	,491	9,145	,000
DAK	,436	,062	,372	7,024	,000
DBH	,323	,059	,246	5,524	,000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 6 dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi semua variabel lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heterokedastisitas.

Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F pada dasarnya mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan F tabel dan T hitung dengan derajat kepercayaan yaitu 5%. Jika F hitung < F tabel, maka tidak signifikan. Dengan ini dapat ditandai dengan nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari *alpha*.

Tabel 7
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	2583626276037,080	4	64590656900 9,269	89,778	,000 ^b
	1237451820007,960	172	7194487325,6 28		
	3821078096045,030	176			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Hasil uji F berdasarkan tabel 7 diatas diperoleh angka dari F hitung adalah sebesar 89,778 dengan angka signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak digunakan dalam penelitian.

Koefisien Determinan (R²)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,676	0,669	84820,32378

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Seperti diketahui tabel 8 diatas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,669 (66,9%). Hal ini menunjukkan bahwa ada keterikatan atau pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap variabel belanja modal untuk tahun berikutnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sedangkan sisanya sebesar 33,1% merupakan faktor lainnya yang tidak ada didalam penelitian yang juga berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji t (Uji Hipotesis)

Uji t pada dasarnya menjelaskan pengaruh variabel independen secara parsial yang terhadap variabel dependen. Proses untuk untuk memahaminya yaitu dengan menyamakan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan dengan nilai t maka t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternative yang diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Tujuan statistik t ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 9
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12825,930	20998,129		,611	,542
PAD	,006	,007	,034	,790	,430
DAU	,246	,027	,491	9,145	,000
DAK	,436	,062	,372	7,024	,000
DBH	,323	,059	,246	5,524	,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 9 diatas diketahui tingkat signifikansi variabel pendapatan asli daerah sebesar $0,430 > 0,05$, varibel dana alokasi umum $0,000 < 0,05$, varibel dana alokasi khusus $0,000 < 0,05$, dan dana bagi hasil $0,000 < 0,05$ yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Analisis dan Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,006 dengan tingkat signifikansi 0,430 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Varian PAD yang berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dapat diartikan bahwa semakin besar varian PAD yang tidak diinginkan (*unfavourable variance*) dapat mengurangi realisasi belanja modal, hal ini dikarenakan realisasi PAD lebih rendah daripada realisasi yang dianggarkan.

Menurut Ghozali (2006) menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan dan belanja pegawai akan mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya tetapi tidak dibarengi dengan belanja modal yang berbanding lurus dengan kenaikan PAD. Sebagian besar kenaikan PAD tidak digunakan pada belanja infrastruktur dan belanja pegawai dikarenakan alokasi yang seharusnya untuk belanja modal dialihkan untuk belanja pegawai yang sifatnya penting.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,246 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk di tahun berikutnya pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berpengaruhnya dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan adanya indikasi bahwa Pememrintah Daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2013) yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka semakin tinggi juga belanja modal yang dianggarkan, hal ini juga menunjukkan jika dana alokasi umum digunakan sebagai dana pembangunan yang diberikan dan telah dialokasikan secara tepat. Selain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum juga mempunyai peran dalam

untuk menambah aset tetap daerah pada belanja modal. Tujuan diberikannya dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah karena untuk pemerataan keuangan daerah, agar tiap masing-masing daerah yang memiliki potensi rendah tidak tertinggal jauh dengan daerah yang mempunyai potensi yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berharap agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana alokasi umum secara tepat dan sesuai sasaran demi terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya dan terwujudnya pelaksanaan desentralisasi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, definisi dari dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu membiayai urusan daerah berupa kegiatan khusus dan sesuai dengan prioritas nasional yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,436 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk di tahun berikutnya pada kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini diterima, maka dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber penerimaan bagi dana perimbangan, jika semakin tinggi kontribusi dana yang diterima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah suatu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka belanja modal yang harus dikeluarkan juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et al* (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, sebaliknya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jannah *et al* (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, definisi dari dana alokasi khusus adalah dana bagi hasil adalah dana yang dialokasikan kepada masing-masing daerah berdasarkan presentase tertentu guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana bagi hasil diperoleh dari hasil bagi pajak dan hasil sumber daya alam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,323 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk di tahun berikutnya pada kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini bermula karena sebagian besar penerimaan dana bagi hasil di Kabupaten/kota di Jawa Timur masih terlalu rendah, sehingga dapat mengakibatkan pada masing-masing daerah belanja modalnya menurun. Tujuan dari dianggarkannya Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan perekonomian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jika kontribusi dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat semakin rendah, maka belanja modal yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota juga akan semakin menurun.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal, sebaliknya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jannah (2017) yang menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa daerah dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru, seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat agar dapat menggali potensi daerah dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal karena berdasarkan Undang-Undang yang berlaku akan terus mengalami peningkatan belanja modal yang diharapkan dapat memberikan peningkatan infrastruktur dan memberikan pelayanan publik dan menyeimbangkan keuangan antar masing-masing daerah agar tidak terjadi ketimpangan fiskal.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur agar lebih mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya pendapatan yang lain agar lebih meningkatkan pendapatan sumber daya dan agar lebih berkembang bayak lagi potensi-potensi sumber daya alam dan sumber pendapatan yang lainnya. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian, contohnya seperti penelitian yang dilakukan di Pulau Jawa yang hasilnya mungkin lebih memperbanyak variabel independen baik ukuran, jenis penerimaan daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah yang terbaru.

Keterbatasan

Lokasi penelitian yang digunakan hanya terbatas pada Kabupaten/Kota yang berada pada Jawa Timur, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, dan Penelitian ini hanya sebatas 5 periode yaitu tahun 2013-2017 diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar hasilnya lebih banyak dan dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan A. Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Bali. *Proceeding. Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya. 16-17.
- Bratakusumah. S. Deddy, Solihin, dan Dadang 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Harianto, D. dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapital. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*: 23-25.

- Jannah, R., D. Wahono, B., dan Agus, M. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi* 6 (1): 123-131.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mentayani, I dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Investasi* 9 (2): 91-102.
- Megawati, F. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ppendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Nurdiwaty, D. Zaman, dan B. Krisnawati, E. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis* 17 (1): 43-59.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Belanja Modal*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabet. Bandung.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Verawaty, C. I. M dan M. Sari. 2015. Determinan Pengalokasian Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV111*. Medan.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1): 1-17.
- Widoasri. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.